

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh transformasi digital yang pesat. Banyak pelaku UMKM tradisional kesulitan beradaptasi dengan perubahan kebiasaan konsumsi masyarakat yang semakin bergantung pada platform daring. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan 30 juta para pelaku UMKM bisa masuk dalam ekosistem digital pada tahun 2024 (ekon.go.id, 21 Maret 2023). Namun, implementasi program percepatan digitalisasi UMKM masih terhambat oleh infrastruktur teknologi yang belum merata dan rendahnya literasi digital di kalangan pengusaha kecil (Suhayati, 2023).

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia memperkirakan pelaku ekonomi UMKM akan menjangkau sekitar 66 juta orang pada tahun 2023, memberikan kontribusi hingga 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, senilai dengan Rp9.580 triliun dan mampu menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja. UMKM merupakan andalan sektor perekonomian masyarakat dan diharapkan kualitasnya terus meningkat. Untuk memprediksi keadaan perekonomian serta menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional, diperlukan peran pemerintah (Mashita, 2024).

Menurut Hidayat, (2024) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang kompleks dalam upayanya untuk tumbuh dan mengembangkan usahanya. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi UMKM adalah akses permodalan. Banyak UMKM yang kesulitan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan formal karena persyaratan kredit yang ketat, kurangnya jaminan, dan suku bunga yang tinggi. Situasi ini sering kali membatasi kemampuan UMKM dalam mengembangkan usahanya atau meningkatkan kapasitas produksinya. Selain itu, infrastruktur dan teknologi juga menjadi kendala besar bagi UMKM di Indonesia. Terbatasnya akses internet di beberapa daerah, terutama di luar Pulau Jawa, membuat UMKM tidak bisa memanfaatkan peluang digital untuk pemasaran dan operasional bisnis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-1/MBU/03/2023 terkait program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pasal 12 “BUMN wajib melaksanakan Program TJSL BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri”. Pasal 13 “Program TJSL BUMN bertujuan untuk memberikan

kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan, memberikan kontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel; dan membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri, serta masyarakat sekitar perusahaan”.

Social Return on Investment menurut (Cahya, 2018) adalah kerangka kerja berdasarkan prinsip akuntansi sosial yang berlaku umum dan dapat digunakan untuk membantu mengelola dan memahami hasil perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian tentang SROI di Indonesia oleh Agustin (2023) menemukan bahwa nilai SROI sebesar 0,36, hal ini menunjukkan bahwa setiap investasi Rp1 oleh perusahaan belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Septasawitri et al. (2023) menemukan bahwa rasio SROI sebesar 7,84 yang mengindikasikan keberhasilan karena melebihi rasio 1.

Penelitian oleh Sutiarto (2024) diperoleh rasio SROI 1,6 dalam setiap investasi Rp 1,- dari program memberikan dampak sebesar Rp 1,6. Penelitian yang dilakukan oleh Premananto & Watulingas (2023) menyimpulkan setiap Rp 1 yang diinvestasikan pada kegiatan Together Grow Stronger akan menghasilkan timbal balik sosial sebesar Rp 23,60. Angka rasio ini terbilang cukup tinggi dan menjanjikan return yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2022) menemukan nilai SROI sebesar 2,34. Hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa program PENDEKAR (Penderes Badeg Karang Sari) tergolong program yang baik dan layak untuk tetap dilaksanakan dan dikembangkan.

Hingga saat ini, belum ada evaluasi menyeluruh untuk menilai pengaruh dan keberhasilan program mitra binaan, sehingga muncul perbedaan pandangan mengenai manfaat program bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui perhitungan Social Return on Investment (SROI), yang memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak sosial dan ekonomi dari investasi di sektor UMKM. Pendapat dari Malini, (2024) menyatakan SROI tidak hanya mengukur keuntungan finansial, tetapi juga manfaat sosial yang lebih luas, seperti penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, SROI membantu UMKM menunjukkan nilai tambah mereka kepada pemangku kepentingan, meningkatkan akses pendanaan, dan mendorong praktik bisnis berkelanjutan.

Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Petrokimia Gresik melalui program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Binaan merupakan inisiatif strategis yang mendukung pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu mitra binaannya adalah BMH Collection yang bergerak di sektor industri songkok. Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan, pemberian modal usaha, dan pembinaan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis *Social Return on Investment* (SROI) pada Usaha Mikro Kecil (UMK) Binaan PT Petrokimia Gresik?
2. Apakah program Usaha Mikro Kecil (UMK) Binaan dapat menunjang tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan rasio *Social Return on Investment* (SROI) pada Usaha Mikro Kecil (UMK) binaan PT Petrokimia Gresik
2. Untuk mengetahui sejauh mana program Usaha Mikro Kecil (UMK) dapat berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bisa digunakan untuk memperluas kerangka konseptual pengukuran dampak sosial investasi, memberikan kontribusi akademis dalam mengukur nilai sosial ekonomi Usaha Mikro Kecil (UMK), menguatkan hubungan antara Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) sebagai strategi pengembangan usaha yang lebih sistematis, akses informasi dan pendampingan yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi lembaga pendanaan atau investor sebagai pengambilan keputusan pendanaan yang lebih strategis, mengidentifikasi UMK berpotensi dan berdampak sosial tinggi, dan pertimbangan investasi berbasis dampak sosial